



KEMENTERIAN HUKUM  
KANTOR WILAYAH  
KALIMANTAN SELATAN

# BULLETIN

## KEMENKUM KALSEL NEWS

MINGGU KE-

4

JUNI 2025

# bangga  
melayani  
bangsa



ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN DAERAH



SOSIALISASI PENTINGNYA  
PERLINDUNGAN MEREK



PENGUATAN PROGRAM  
PEMBINAAN HUKUM

DIVISI  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DAN PEMBINAAN HUKUM

DIVISI  
PELAYANAN HUKUM

BAGIAN  
TATA USAHA DAN UMUM

Terhubung lebih dekat:



kemenkumkalsel



@kemenkumkalsel



kalsel.kemenkum.go.id

# HIGHLIGHT

## BERGERAK NEWS



**09** MAHASISWA UIN ANTASARI  
BELAJAR HUKUM DI KANWIL  
KEMENKUM KALSEL

**12** KEMENKUM KALSEL LANTIK NOTARIS  
PENGGANTI DI BANJARMASIN DAN  
TANAH LAUT, WUJUDKAN PELAYANAN  
NOTARIATAN TERBAIK

**19** LAKUKAN ANALISIS DAN EVALUASI,  
KEMENKUM KALSEL DAN PEMKAB  
BATOLA KAJI PERDA PERLINDUNGAN  
LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

**14** TINGKATKAN KOMPETENSI SDM,  
KANWIL KEMENKUM KALSEL GELAR  
PENDALAMAN MATERI PERANCANGAN  
PERATURAN DAN APLIKASI E-  
HARMONISASI

**26** KANWIL KEMENKUM KALSEL  
GELAR RAPAT HARMONISASI  
RANPERBUP HULU SUNGAI  
TENGAH TERKAIT  
PENYELENGGARAAN KOPERASI  
DESA MERAH PUTIH



**03** HARMONISAI RANPERDA  
BERSAMA PEMKAB KOTABARU



**16** KEMENKUM KALSEL HADIRI  
GROUND BREAKING RENOVASI  
GEDUNG PTUN BANJARMASIN



## Apel Pagi Kemenkum Kalsel, Serukan Semangat WBK dan Disiplin ASN



Banjarmasin, Humas\_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan kembali melaksanakan apel pagi rutin pada Senin (23/6), sebagai bagian dari komitmen terhadap kedisiplinan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Apel yang berlangsung di halaman kantor ini dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Eryck Yulianto, dan Bertindak sebagai Pembina Apel, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv PPPH), Anton Edward Wardhana.

Dalam amanatnya, Anton Edward Wardhana selaku Kadiv PPPH menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang terus konsisten melaksanakan apel sebagai bentuk kedisiplinan ASN. Ia juga mengajak seluruh pegawai untuk sejenak mendoakan salah satu pejabat Badan Strategi Kebijakan (BSK) yang telah berpulang.

Lebih lanjut, Anton menegaskan pentingnya menjaga semangat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). “Layanan kepada masyarakat harus dilakukan dengan sepenuh hati. Pemenuhan data dukung, khususnya terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sangat penting karena seluruh kegiatan harus selaras dengan output yang telah direncanakan dalam perjanjian kinerja,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa kegagalan dalam perencanaan sama artinya dengan merencanakan kegagalan. Oleh karena itu, seluruh jajaran diharapkan mampu bekerja dengan terarah dan terukur sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

Apel pagi ini diikuti oleh seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dan berlangsung dengan tertib dan lancar. Pelaksanaan apel tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.



## Kemenkum Kassel Fasilitasi Harmonisasi Ranperda Bersama Pemkab Kotabaru



Banjarmasin, Humas\_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar rapat harmonisasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru pada Senin (23/06/2025). Kegiatan ini berlangsung di Balai Pertemuan Garuda Kemenkum Kassel dan difokuskan pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Kotabaru.

Adapun topik utama dalam rapat harmonisasi ini mencakup tiga Ranperda, yakni tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Waralaba.

Rapat dipimpin langsung oleh Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Perancang Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kassel. Dalam sambutannya, Anton menjelaskan bahwa proses harmonisasi merupakan langkah penting untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.

“Fungsi harmonisasi adalah untuk menyelaraskan setiap Ranperda agar tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi, sekaligus memastikan substansi hukumnya memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan,” ujar Anton.

Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang tengah disusun Pemerintah Kabupaten Kotabaru mencakup berbagai aspek strategis pembangunan daerah. Pertama, Ranperda tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan indeks pembangunan manusia melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi akses teknologi.

Kedua, Ranperda tentang Waralaba diarahkan untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong kemitraan usaha yang adil, terutama antara pemberi waralaba dan pelaku usaha mikro, serta mengatur sistem bisnis dan pengawasan oleh pemerintah daerah. Ketiga, Ranperda tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) difokuskan pada perlindungan karya dan inovasi masyarakat, penguatan budaya lokal, serta pengembangan ekonomi kreatif melalui fasilitasi pencatatan, pendaftaran, dan pemanfaatan KI secara menyeluruh.

Jajaran perancang perundang-undangan dari Kanwil Kemenkum Kassel turut memberikan berbagai masukan terhadap rancangan yang diajukan. Mereka menekankan pentingnya fasilitasi dari pemerintah daerah dalam mendorong lahirnya inovasi daerah, termasuk peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia.

Melalui rapat ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dapat menyusun peraturan daerah yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret.



## Kemenkum Kalsel Ikuti Serial Webinar Pengembangan Kompetensi ASN #2: Dorong Pemanfaatan Data dalam Pengambilan Keputusan Publik



Banjarmasin, Humas\_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Serial Webinar Pengembangan Kompetensi ASN #2 dengan tema “Pemanfaatan Data Dalam Pengambilan Keputusan dan Kebijakan Publik” yang diselenggarakan secara daring oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Tim Kerja Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, yang secara aktif menyimak dan mendalami materi yang disampaikan selama webinar berlangsung. Partisipasi tim ini sejalan dengan upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual, khususnya dalam menerapkan pendekatan berbasis data dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan yang relevan dengan pelayanan publik.

Partisipasi aktif Kanwil Kemenkum Kalsel menunjukkan komitmen dalam memperkuat kapasitas ASN, khususnya dalam pemanfaatan data sebagai landasan penyusunan kebijakan yang lebih akurat dan berpihak pada masyarakat.

Webinar bertujuan memberikan pemahaman komprehensif kepada ASN mengenai pentingnya optimalisasi data dalam setiap proses pengambilan keputusan publik. Dalam paparannya, narasumber menegaskan urgensi penggunaan metodologi pengumpulan data yang rigid dan terstruktur untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas analisis.

Disampaikan pula bahwa proses monitoring dan evaluasi (monev) sebaiknya telah dirancang sejak tahap awal perumusan kebijakan. Pendekatan partisipatif melalui pelibatan langsung masyarakat dalam pengumpulan, pengelolaan, hingga pelaporan data dinilai sebagai kunci keberhasilan kebijakan publik yang berbasis bukti (evidence-based policy), transparan, dan berdampak langsung.

Kegiatan berlangsung lancar dan diikuti dengan antusias oleh peserta dari lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel. Keterlibatan aktif dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia serta mendukung agenda reformasi birokrasi berbasis data dan teknologi informasi.



## Perkuat Literasi Kekayaan Intelektual, Kemenkum Kalsel Edukasi Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin



Banjarmasin, KI\_Info — Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan hadir sebagai narasumber dalam kegiatan “Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual dan Pengenalan Paten Tahun 2025” yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Senin (23/06/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 50 civitas akademik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Hadir sebagai pemateri dari Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan yakni Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi beserta tim.

Dalam pemaparannya, Riswandi menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) saat ini tengah mendorong pelaksanaan Catur Program Unggulan (CPU), yang meliputi Jelajah Kekayaan Intelektual, Akselerasi Penyelesaian Permohonan KI, Mobile Intellectual Property Clinic, serta pengembangan Kawasan Wisata Berbasis KI. Tujuan program ini adalah meningkatkan jumlah permohonan, khususnya untuk Hak Cipta dan Desain Industri pada tahun 2025.

Selain itu, narasumber juga menekankan pentingnya tiga unsur utama dalam sistem kekayaan intelektual, yaitu pendaftaran, komersialisasi, dan penegakan hukum. Perlindungan HKI tidak hanya menjaga orisinalitas dan reputasi karya, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi penciptanya. Jenis-jenis KI yang relevan bagi civitas akademik, seperti hak cipta, merek, dan desain industri, turut dijelaskan dalam sesi ini.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Rifan Fikri, Kasubdit Permohonan dan Pelayanan Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang DJKI secara daring. Ia menguraikan konsep dasar paten serta tahapan permohonan pendaftaran paten, mulai dari pengajuan, pemeriksaan substantif, hingga penerbitan sertifikat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta semakin terdorong untuk menciptakan karya-karya inovatif dan memanfaatkan layanan HKI secara optimal, guna mendukung pengembangan keilmuan dan ekonomi kreatif di lingkungan perguruan tinggi.

## Sosialisasi Layanan Apostille: Dukung Mahasiswa IAI DU Kandangan Menuju Kancah Global



Hulu Sungai Selatan, AHU\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Sosialisasi Layanan Apostille bagi mahasiswa Institut Agama Islam Darul Ulum (IAI DU) Kandangan, Senin (23/6). Bertempat di Aula Kampus IAI DU Kandangan, kegiatan ini diikuti oleh jajaran civitas akademika serta 50 orang mahasiswa dengan semangat tema “Memberikan Kemudahan Legalisasi Apostille Dokumen untuk Pendidikan ke Luar Negeri”.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa layanan Apostille merupakan inovasi dari Kementerian Hukum RI melalui Ditjen AHU yang bertujuan untuk menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik yang dibutuhkan masyarakat, termasuk untuk keperluan studi dan pekerjaan di luar negeri.

“Dengan layanan Apostille, legalisasi dokumen seperti ijazah, transkrip nilai, akta nikah, dan dokumen kependudukan kini cukup dilakukan melalui satu langkah di Kementerian Hukum sebagai otoritas Apostille. Ini merupakan bagian dari upaya kami memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin bersaing di tingkat global,” ujar Meidy.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Dr. Dadang Abdullah, dari Universitas Lambung Mangkurat serta Dewi Woro Lestari, Kepala Bidang Pelayanan AHU sekaligus Ketua Panitia. Keduanya memaparkan materi seputar aspek hukum dan teknis layanan Apostille, termasuk tata cara permohonan, dokumen yang dibutuhkan, dan manfaatnya dalam mendukung mobilitas akademik internasional. Kegiatan ini juga merujuk pada dasar hukum Permenkumham Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille.

Sosialisasi berjalan lancar dan disambut antusias para mahasiswa. Berbagai pertanyaan dan diskusi aktif muncul dari peserta, terutama berkaitan dengan prosedur dan manfaat Apostille dalam rencana studi ke luar negeri. Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa IAI DU Kandangan dapat memahami pentingnya legalisasi dokumen yang sah dan diakui secara internasional guna mempersiapkan diri lebih baik dalam persaingan global.

# Pemerintah RI Sepakati DIM RUU KUHAP



Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia telah menyepakati Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Kesepakatan ini ditandai dengan pembubuhan paraf DIM RUU KUHAP oleh Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas; Ketua Mahkamah Agung, Sunarto; Jaksa Agung, ST Burhanuddin; Kapolri Listyo Sigit Prabowo; dan Wakil Menteri Sekretariat Negara, Bambang Eko Suhariyanto, Senin (23/6/2025) di gedung Kementerian Hukum (Kemenkum).

Menkum Supratman mengatakan bahwa DIM tersebut merupakan hasil kolaborasi antar kementerian dan lembaga untuk membentuk sistem hukum yang lebih relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, dengan memberi perhatian bagi perlindungan hak asasi manusia.

“Koordinasi yang baik saat ini tercermin di dalam DIM, dengan semua kelebihan maupun penambahan yang ada di dalam RUU KUHAP, di mana letak perlindungan terhadap hak asasi manusia begitu diperhatikan,” katanya saat acara penandatanganan DIM RUU KUHAP.

Menurut Supratman, koordinasi menjadi poin penting dalam RUU KUHAP ini agar peran dan kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga menjadi lebih jelas dan tidak saling mengintervensi.

“Peran pengacara juga diberi ruang yang cukup. Ini langkah strategis yang kita ambil, suatu tindakan yang betul-betul bisa menjadi contoh bagi semua lembaga negara, kementerian yang lain, untuk berbagi soal peran dan kewenangan masing-masing,” ujar Menteri kelahiran Sulawesi ini.



Senada dengan Supratman, Wakil Menteri Hukum, Edward O. S. Hiariej, menjelaskan bahwa hukum acara pidana Indonesia dibangun berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu. Artinya, masing-masing lembaga negara mempunyai kewenangan tetapi saling berkoordinasi antara satu dan lainnya.

“Tidak mungkin penyidik akan berdiri sendiri. Jadi sistem peradilan pidana terpadu itu yang memperlihatkan bagaimana hukum acara itu berjalan. Dan sistem peradilan pidana terpadu yang di dalamnya ada Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, kemudian ada juga peran dari advokat untuk menyeimbangkan kewenangan yang ada pada aparat penegak hukum. Jadi sudah pasti tidak ada intervensi kewenangan,” tambahnya.

Wakil Menteri Hukum menyebutkan bahwa selanjutnya naskah DIM RUU KUHAP ini akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan jadwal undangan dari DPR nantinya. “Hari ini telah diparaf DIM, kemudian kami menunggu undangan dari komisi III DPR dan pada saat itu kami akan menyerahkan DIM secara resmi kepada komisi III DPR. Dan komisi III yang akan menentukan jadwal pembahasannya,” ucap Profesor bidang hukum ini.

Adapun penyusunan DIM RUU KUHAP ini telah melibatkan berbagai kelompok masyarakat serta kementerian/lembaga negara. Kemenkum telah menjaring masukan dari para pakar hukum, advokat, akademisi, kementerian/lembaga terkait, hingga koalisi masyarakat sipil.

Secara terpisah Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Meidy Firmansyah menyambut baik kesepakatan DIM RUU KUHAP yang dilakukan di tingkat pusat. “Ini langkah maju dalam pembaruan hukum acara pidana. Kesepakatan ini menunjukkan semangat kerja sama antar lembaga dan kami di daerah siap mendukung dan menjalankan kebijakan ini sesuai tugas Kemenkum,” ujarnya.

# Menata Ulang KUHAP untuk Hukum Indonesia yang Lebih Adaptif



Jakarta - Lebih dari 4 dekade Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang juga dikenal sebagai KUHAP. Dalam rentang waktu tersebut, dunia telah berubah, pun dengan sistem hukum yang selalu berkembang. Sudah saatnya KUHAP diperbarui demi sistem peradilan pidana yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengatakan KUHAP merupakan pembaruan dari Hukum Acara Pidana kolonial yang berbentuk *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*. Dimana KUHAP telah digunakan lebih dari 40 tahun, dan dalam penerapannya masih terdapat banyak kekurangan.

“Dengan adanya perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang, maka perlu dilakukan penggantian KUHAP,” ujar Supratman dalam kegiatan Penandatanganan Naskah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP, Senin (23/6/2025) petang.

Lebih jauh menteri yang sering disapa Bang Maman ini mengatakan jika koordinasi yang baik antara penegak hukum dalam menghasilkan DIM pada RUU KUHAP sangat memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

“Langkah strategis yang kita ambil pada hari ini adalah suatu tindakan yang betul-betul bisa menjadi contoh bagi semua lembaga negara, kementerian yang lain, untuk berbagi dalam menyangkut soal peran dan kewenangan masing-masing,” ujar Maman.

Sementara itu Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, mengatakan tantangan yang paling urgen saat ini adalah revolusi industri. Revolusi industri 4.0 memiliki ciri khas internet of things, di mana segala sesuatunya dilakukan melalui media internet. Sedangkan revolusi industri 5.0 itu adalah kolaborasi antara manusia dengan robotik.

“Nah ini menjadi tantangan, dan termasuk nanti alat pembuktian yang akan diajukan para pihak, otomatis akan mengarah kepada hal-hal yang terkait dengan kemajuan teknologi informasi. Saya yakin, saya percaya bahwa DIM yang diusulkan, yang dibahas sekalian itu sudah menampung (tantangan revolusi industri),” ujar Sunarto.

RUU KUHAP diharapkan mampu menjadi instrumen hukum acara pidana yang menjamin supremasi hukum, perlindungan hak setiap warga negara, peradilan yang transparan dan berkeadilan, dan sistem peradilan pidana yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Secara terpisah Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Meidy Firmansyah menyambut baik langkah pembaruan KUHAP yang tengah dilakukan pemerintah. Menurutnya, pembaruan KUHAP ini penting agar sistem peradilan pidana bisa lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat perlindungan hak asasi manusia.

“Kami siap mendukung kebijakan ini di daerah, agar pelaksanaan hukum acara pidana menjadi lebih modern, adil, dan berpihak pada keadilan substantif,” tutupnya.

## Kunjungan Edukatif, Mahasiswa UIN Antasari Belajar Hukum di Kanwil Kemenkum Kalsel



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menerima kunjungan rombongan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin dalam rangka kegiatan Study Tour yang berlangsung di Balai Pertemuan Garuda, Selasa (24/6).

Kegiatan ini dihadiri oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Meidy Firmansyah, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta sejumlah pejabat fungsional tertentu (JFT) Ahli Madya.

Dalam sambutannya, Meidy Firmansyah menyampaikan apresiasinya atas kehadiran para mahasiswa serta semangat belajar yang mereka tunjukkan. Ia menekankan bahwa kegiatan ini menjadi wadah yang baik untuk saling berdiskusi dan mengenal lebih dalam tentang tugas serta fungsi dari Kementerian Hukum, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.

"Selamat datang kepada adik-adik mahasiswa. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang dialog yang produktif dalam mengenal lebih jauh peran Kemenkum," ujar Meidy.

Materi kegiatan disampaikan oleh Kepala Divisi P3H yang memperkenalkan struktur dan fungsi masing-masing direktorat di bawah naungan Kemenkum. Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan pemahaman mengenai tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan secara spesifik.

Sesi diskusi menjadi bagian yang paling interaktif dalam kegiatan ini. Para mahasiswa aktif bertanya seputar berbagai isu hukum seperti Rahasia Dagang, peran Paralegal di masyarakat, hingga keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

Kegiatan berlangsung lancar dan mendapat respons positif dari peserta. Diharapkan, pengalaman ini dapat memperkaya wawasan mahasiswa UIN Antasari mengenai praktik hukum dan kelembagaan pemerintah di bidang hukum.



## Bahas Pembangunan Lima Tahun Kedepan, Kemenkum Kalsel Fasilitasi Harmonisasi Ranperda RPJMD HSS



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) kembali menggelar rapat harmonisasi bersama pemerintah daerah. Kali ini, harmonisasi dilaksanakan bersama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana mewakili Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Meidy Firmansyah. Jalannya rapat dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Bahjahtul Mardiah, serta diikuti oleh para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan dan CPNS Kanwil Kemenkum Kalsel.

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hadir Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Zulkifli; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, M. Arlian Syahril; Inspektur Daerah, Kiki Rachmawaty; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Tedy Soetedjo; Kepala Dinas Kesehatan, Rasyidah; Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Akhmad Supian; serta perwakilan dari Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; Bagian Hukum Sekretariat Daerah; serta Bagian Fasilitasi Pembentukan Legislasi Daerah dan Kehumasan Sekretariat DPRD.



Dalam sambutannya, Kepala Divisi PPPH menegaskan pentingnya kegiatan harmonisasi dalam proses pembentukan peraturan daerah. “Rapat ini merupakan prosedur krusial untuk menyelaraskan substansi rancangan peraturan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memastikan kualitas regulasi yang dihasilkan sesuai amanat undang-undang,” ucapnya.

Hal ini disambut positif oleh Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Zulkifli, yang mewakili Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ia menyampaikan apresiasi atas fasilitasi dan dukungan dari Kanwil Kemenkum Kalsel dalam proses harmonisasi ini.

“Harmonisasi merupakan langkah penting dalam pembentukan produk hukum daerah, di mana pembahasan kontekstual dan substansi teknis dalam ranperda menjadi sangat krusial untuk menghasilkan regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya.

Senada dengan itu, Kepala Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan, M. Arlian Syahril selaku pemrakarsa penyusunan Ranperda RPJMD 2025–2029, menyampaikan bahwa peraturan ini menjadi pedoman penting agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan memiliki sasaran yang jelas.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan baik dan lancar. Setiap pasal dalam ranperda dibahas secara mendalam dan dilakukan perbaikan melalui komunikasi yang konstruktif, sehingga tercapai pembulatan dan pematapan konsep ranperda secara bersama.

## Tanah Laut Punya Potensi! Dua Produk Lokal Diusulkan Jadi Indikasi Geografis



Tanah Laut, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan kegiatan pendampingan pendaftaran Indikasi Geografis (IG) pada Selasa, 24 Juni 2025, bertempat di Kantor Desa Handil Birayang Bawah, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel dalam mendorong perlindungan kekayaan intelektual komunal dan pemanfaatan potensi lokal berbasis wilayah. Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah pemangku kepentingan daerah, antara lain perwakilan dari Dinas Nakerin, Dinas PMD, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, serta Dinas Pertanian dan Bapperida Kabupaten Tanah Laut. Selain itu, hadir pula Ketua DPC Gekrafs Tanah Laut beserta pengurus, Kepala Desa Handil Birayang Bawah, serta perwakilan Kecamatan Bumi Makmur.

Dalam sesi pemaparan, tim dari Kanwil Kemenkum Kalsel menjelaskan pentingnya pendaftaran IG sebagai upaya strategis untuk memberikan perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerah. Dua produk lokal yang diidentifikasi memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai IG adalah Padi Mayang Jambun dan Pisang Tundang. Kedua produk ini dinilai memiliki kekhasan geografis dan nilai budaya lokal yang kuat.

Tim teknis memaparkan tahapan pendaftaran IG, mulai dari identifikasi dan pengumpulan data, penyusunan dokumen deskripsi, hingga pengajuan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kegiatan ini juga membahas dokumen pendukung yang perlu disiapkan, termasuk legalitas kelompok pengusul, data historis dan geografis produk, serta bukti-bukti pendukung lainnya.



Tidak hanya dari sisi teknis, kegiatan ini juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan kelompok masyarakat pengusul serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan kualitas produk. Pendaftaran IG diyakini akan memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, antara lain perlindungan nama produk, peningkatan nilai jual, hingga kontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal berbasis budaya dan kearifan lokal.

Kegiatan berjalan lancar dan mendapat sambutan positif dari para peserta. Diharapkan, pendampingan ini dapat menjadi langkah awal yang konkret dalam mewujudkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh masyarakat Desa Handil Birayang Bawah dan sekitarnya.

## Kemenkum Kalsel Lantik Notaris Pengganti di Banjarmasin dan Tanah Laut, Wujudkan Pelayanan Notariatan Terbaik



Banjarmasin, Humas\_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan terus berkomitmen dalam menjaga kelangsungan pelayanan kenotariatan dengan melantik notaris pengganti Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut untuk menggantikan sementara notaris yang menjalani cuti sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel, Rabu (25/6/2025), Plt. Kepala Kantor Wilayah, Meidy Firmansyah melantik dan mengambil sumpah 2 (dua) orang Notaris Pengganti, yakni Rika Mega Mustika, S.H., ditunjuk sebagai Notaris Pengganti Kota Banjarmasin menggantikan sementara Notaris Mery Liana, S.H., M.Kn., yang menjalani cuti selama 17 (tujuh belas) hari terhitung sejak 25 Juni 2025 hingga 11 Juli 2025 serta Wahyu Efendy, S.H., M.Kn., ditunjuk sebagai Notaris Pengganti Kabupaten Tanah Laut menggantikan sementara Notaris Norlaila Hayati, S.H., M.Kn., yang menjalani cuti selama 13 (tiga belas) hari terhitung sejak 29 Juni 2025 hingga 11 Juli 2025.

Dalam sambutannya, Plt. Kepala Kantor Wilayah, Meidy Firmansyah menyampaikan bahwa pelantikan Notaris Pengganti ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin terselenggaranya pelayanan hukum yang berkelanjutan.

“Hal ini sejalan dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang Notaris Pengganti, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Seorang Notaris Pengganti memegang peranan penting serta memiliki hak, kewenangan, dan konsekuensi hukum yang sama dengan Notaris definitif selama menjalankan tugasnya,” ujar Meidy.

Ia juga mengingatkan pentingnya integritas dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas kenotariatan, serta kewajiban untuk mengisi dan melaporkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sebagai bagian dari perlindungan hukum dan akuntabilitas profesi.

“Saya ingin mengingatkan kepada Saudara Notaris Pengganti akan pentingnya memahami prinsip perlindungan hukum bagi pengguna jasa serta menjaga integritas profesi notaris. Setiap notaris, termasuk Notaris Pengganti, wajib mengisi dan melaporkan PMPJ sebagai bagian dari mekanisme perlindungan hukum dan akuntabilitas profesi,” tambahnya.

Di akhir sambutan, Meidy Firmansyah mengucapkan selamat kepada para Notaris Pengganti yang baru dilantik, seraya berharap mereka dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, keadilan, dan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.

Seluruh kegiatan berlangsung dengan baik dan lancar. Pelantikan ini turut dihadiri oleh Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kantor Wilayah, Para Pejabat Manajerial dan Non Manajerial, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Banjarmasin, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tanah Laut, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Banjarmasin, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Tanah Laut, serta rohaniwan.

## Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Harmonisasi Ranperda RPPLH Barito Kuala



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar rapat harmonisasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala pada Rabu (25/06/2025). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kakanwil Kemenkum Kalsel dan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023–2052.

Rapat dipimpin oleh Nizar Al Farisy, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda. Dalam pengantarnya, Nizar menekankan bahwa fungsi utama dari harmonisasi adalah untuk menyelaraskan substansi Ranperda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak terjadi pertentangan hukum dan tercipta kepastian hukum dalam implementasinya.

Tim perancang dari Kantor Wilayah turut memberikan masukan dan saran konstruktif terhadap materi muatan Ranperda RPPLH. Salah satu poin penting yang ditekankan adalah pentingnya inovasi dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Sebagai informasi, Ranperda RPPLH ini disusun sebagai pedoman perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Barito Kuala selama 30 tahun ke depan. Di dalamnya mencakup perencanaan pemanfaatan sumber daya alam, pengendalian dan pemantauan lingkungan, serta adaptasi terhadap perubahan iklim, sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dengan adanya Ranperda ini, diharapkan Barito Kuala mampu menjalankan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, menjamin kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat peran serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam.



## Tingkatkan Kompetensi SDM, Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Pendalaman Materi Perancangan Peraturan dan Aplikasi e-Harmonisasi



Banjarmasin, Humas\_Info - Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan pemahaman teknis Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya bagi para pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan “Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Perundang-undangan dan Aplikasi e-Harmonisasi”. Kefiatan tersebut berlangsung di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel pada Rabu (25/06).

Kegiatan ini diikuti oleh perancang peraturan dari berbagai instansi, antara lain Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Sekretariat DPRD se-Kalimantan Selatan. Hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, perwakilan Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin, perwakilan Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Kuala, perwakilan Kepala Biro Hukum Pemprov Kalsel, perwakilan Kabag Hukum Pemkot Banjarmasin, dan perwakilan Kabag Hukum Pemkab Batola.

Acara dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Eryck Yulianto. Dalam kesempatan tersebut, materi pertama bertajuk Perancangan Peraturan Perundang-undangan dan e-Harmonisasi disampaikan oleh Perancang Ahli Madya, Bahjatul Mardiah. Selanjutnya, paparan teknis penggunaan Aplikasi e-Harmonisasi disampaikan oleh Perancang Ahli Muda, Nizar Al Farisy. Kedua materi tersebut menjadi penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi proses harmonisasi peraturan perundang-undangan secara digital.

Dalam sambutan penutupnya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), Anton Edward Wardhana menyampaikan apresiasi atas antusiasme peserta. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan sesuai dengan asas, norma, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar lembaga, meningkatkan kapasitas perancang, dan memperluas pemanfaatan aplikasi e-Harmonisasi dalam setiap proses harmonisasi regulasi,” ujar Anton.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel terus menunjukkan komitmennya dalam membangun kualitas SDM yang mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola regulasi yang baik di daerah.

## Tim BSK Kanwil Kemenkum Kalsel Laksanakan Rapat Bahas Tingkatkan Akurasi Penilaian IRH untuk Dukung Target Nasional



Banjarmasin, Humas\_info – Dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas nasional terkait Reformasi Hukum di tingkat daerah, Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan Hukum melakukan pengukuran Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada pemerintah daerah. Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan rapat pembahasan verifikasi data dukung yang telah diunggah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pada Rabu (26/06) bertempat di ruang rapat Bagian TU dan Umum.

Pengukuran Indeks Reformasi Hukum menjadi instrumen penting dalam menilai sejauh mana praktik hukum yang baik telah diterapkan oleh pemerintah daerah, meliputi aspek regulasi, kelembagaan, pelayanan publik berbasis hukum, serta akses terhadap keadilan. Komponen utama dalam penilaian ini terletak pada data dukung yang disampaikan pemerintah daerah, sehingga proses verifikasi atas keabsahan, kesesuaian, dan kelengkapan dokumen menjadi langkah krusial demi menjamin kualitas hasil pengukuran IRH.

Ketua Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan, Eldy Prasetya Setiawan menegaskan komitmennya bersama seluruh tim untuk melaksanakan proses penilaian dengan optimal.

"Kami berkomitmen untuk menjalankan verifikasi ini secara objektif dan maksimal, demi memastikan kualitas pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum berjalan sesuai standar. Kami juga mendorong pemerintah daerah agar dapat memenuhi seluruh data dukung yang diminta secara lengkap dan tepat waktu, karena hal ini sangat menentukan keberhasilan penilaian IRH," ujar Eldy.

Dengan adanya rapat ini, diharapkan proses verifikasi data dukung IRH tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan menyatakan komitmennya untuk terus mendampingi dan memberikan asistensi kepada pemerintah daerah guna mendorong terwujudnya reformasi hukum yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan, Eldy Prasetya Setiawan, dan dihadiri oleh seluruh anggota tim. Dalam kesempatan tersebut, Eldy memaparkan mekanisme verifikasi data dukung, termasuk kriteria penilaian, prosedur pengecekan kesesuaian dokumen, hingga hal-hal teknis terkait pelaporan hasil. Diskusi berlangsung interaktif dengan masing-masing anggota menyampaikan analisis awal terhadap data yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah.

## Wujudkan Sinergi Antar Lembaga, Kanwil Kemenkum Kalsel Hadiri Ground Breaking Renovasi Gedung PTUN Banjarmasin



Banjarmasin, Humas\_Info – Dalam rangka memperkuat sinergi antar lembaga penegak hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut menghadiri kegiatan Ground Breaking Renovasi Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin, yang dilaksanakan pada Kamis (26/6) di gedung PTUN Banjarmasin.

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Meidy Firmansyah hadir langsung dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan sarana prasarana lembaga peradilan di wilayah Kalimantan Selatan. Kehadiran ini juga menjadi simbol kolaborasi yang erat antara Kementerian Hukum dengan PTUN yang secara geografis berdampingan langsung dengan gedung Kanwil Kemenkum Kalsel.

“Kami menyambut baik pelaksanaan renovasi gedung PTUN ini sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik. Dengan lokasi yang berdampingan, sudah sepatutnya sinergi ini terus diperkuat demi pelayanan hukum terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkap Meidy Firmansyah.



Kegiatan turut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Mohamad Husein Rozarius, Ketua PTUN Banjarmasin, Roni Erry Saputro, Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, serta Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin serta stakeholder terkait.

Dalam sambutannya, Ketua PTUN Banjarmasin, Roni Erry Saputro menyampaikan bahwa keberhasilan renovasi ini diharapkan akan membawa manfaat besar tidak hanya bagi lembaga peradilan, tetapi juga bagi masyarakat Kalimantan Selatan secara luas.

“Kami siap bersinergi dengan seluruh stakeholder, untuk memastikan proses renovasi berjalan dengan baik dan hasilnya maksimal,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi TUN Banjarmasin, Mohamad Husein Rozarius yang sekaligus membuka kegiatan menyatakan bahwa pembangunan ini merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas layanan hukum dan peradilan.

Kegiatan diakhiri dengan prosesi peletakan batu pertama oleh Ketua PT TUN yang disaksikan para tamu undangan, dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan penguatan lembaga hukum yang profesional, modern, dan bersinergi.

## Bahas Ranperbup Koperasi Merah Putih, Kanwil Kemenkum Kalsel Fasilitasi Harmonisasi Regulasi



Banjarmasin, Humas\_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar Rapat Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Banjar tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, bertempat di Balai Pertemuan Garuda, Kamis (26/6).

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton E. Wardhana, yang menegaskan pentingnya penyusunan peraturan daerah yang sejalan dengan prinsip hukum dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

“Kami di Kanwil Kemenkum hadir untuk memastikan setiap produk hukum daerah tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Anton dalam sambutannya.

Turut hadir dalam kegiatan ini jajaran Pemerintah Kabupaten Banjar, termasuk Ibu Muryani Hastuti, Kepala Bidang Perkoperasian, yang menyampaikan latar belakang lahirnya rancangan peraturan tersebut sebagai bagian dari penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Proses harmonisasi dipandu oleh Bahjatul Mardhiah, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, yang memberikan sejumlah catatan teknis mulai dari judul, sistematika penulisan, hingga materi muatan pasal demi pasal. Tim perancang juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengatur ketentuan yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rapat ditutup oleh Anton E. Wardhana, yang dalam kesempatan tersebut turut memaparkan sejumlah program kerja Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, khususnya dalam mendukung penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas.

Dengan berlangsungnya kegiatan ini, diharapkan Rancangan Peraturan Bupati Banjar tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat segera difinalisasi dan diundangkan, serta memberikan dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Banjar.



## Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Harmonisasi Ranperbup HSU Terkait Cadangan Pangan dan Penanggulangan Bencana



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar rapat harmonisasi bersama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) terkait dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) pada Kamis (26/06/2025). Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel.

Pembahasan dalam rapat mencakup dua rancangan utama, yakni Ranperbup tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten HSU dan Ranperbup tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten HSU Tahun 2025–2029.

Rapat dipimpin langsung oleh Edward Anton, Kepala Divisi Perancang Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel. Dalam arahannya, Edward menegaskan pentingnya fungsi harmonisasi dalam proses pembentukan peraturan.

“Harmonisasi bertujuan untuk menyelaraskan setiap rancangan peraturan yang diajukan agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun peraturan lainnya,” ungkapnya.

Tim perancang peraturan perundang-undangan dari Kanwil Kemenkum Kalsel turut memberikan masukan serta saran perbaikan terhadap kedua Ranperbup yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten HSU.

Diharapkan, melalui kegiatan harmonisasi ini, kualitas regulasi daerah dapat ditingkatkan dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Rapat ini juga menjadi langkah awal yang strategis dalam memastikan kedua peraturan tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan diterapkan dengan efektif.





## Lakukan Analisis dan Evaluasi, Kemenkum Kalsel dan Pemkab Batola Kaji Perda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan



Barito Kuala, Humas\_Info – Kamis, (26/6/25) Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan melakukan kegiatan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah bersama Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Barito Kuala. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel bersama Bagian Hukum Setda Kabupaten Batola ini bertujuan untuk melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah dengan tema “Pengelolaan Lahan”.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Sri Yunita, bersama Analis Hukum Ahli Muda, Yulli Rachmadani, Analis Hukum Ahli Pertama, Mariana Rahmi, dan CPNS Kanwil Kemenkum Kalsel disambut oleh Raudatun Nadiah, Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mewakili Kabag Hukum Setda Batola beserta jajaran Bagian Hukum Setda.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, Anton Edward Wardhana, melalui Sri Yunita selaku Ketua Tim menyampaikan bahwa sebagai negara agraris, ketergantungan Indonesia terhadap sektor pertanian sangat tinggi, baik dalam pemenuhan kebutuhan pangan maupun penyediaan lapangan kerja. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap lahan—khususnya lahan pertanian—menjadi hal yang mendesak untuk diperkuat melalui evaluasi regulasi yang berlaku. Adapun Peraturan Daerah yang dilakukan analisis dan evaluasi dalam kegiatan ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Sri Yunita menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan berdasarkan enam dimensi utama, yakni: kesesuaian dengan Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, harmonisasi pengaturan, kejelasan rumusan norma, kesesuaian asas bidang hukum, serta efektivitas pelaksanaan.

“Tujuan utama evaluasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas regulasi dan memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah agar Perda yang ada tetap relevan dan implementatif sesuai perkembangan zaman,” tambahnya.

Respons positif disampaikan oleh jajaran Bagian Hukum Setda Kabupaten Batola. Raudatun Nadiah menuturkan bahwa analisis dan evaluasi atas peraturan daerah yang telah ada selama ini sangat diperlukan guna memastikan kebermanfaatannya.

Dalam pertemuan tersebut, Raudatun Nadiah juga mengungkapkan rencana Setda Batola untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap dua Peraturan Daerah lainnya, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya mengimplementasikan Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Barito Kuala.

Rencana evaluasi ini disambut baik oleh Kanwil Kemenkum Kalsel dan akan segera ditindaklanjuti agar proses analisis dan evaluasi terhadap kedua Perda tersebut dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.

## Dekatkan Layanan Hukum, Kanwil Kemenkum Sambangi Posbankum di Hulu Sungai Utara



HSU, Humas\_Info — Dalam rangka memperkuat akses keadilan bagi masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) mendorong pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan. Posbankum ini telah resmi diluncurkan pada 5 Juni 2025 lalu sebagai bagian dari perluasan layanan bantuan hukum berbasis komunitas.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kanwil Kemenkum Kalsel yang dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv PPPH), Anton Edward Wardhana, bersama jajaran Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Penyuluh Hukum, meninjau langsung keberadaan Posbankum di Desa Palimbang Sari dan Kelurahan Sungai Malang, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), pada Kamis (25/6/2025).

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari partisipasi desa dan kelurahan dalam program Peacemaker Justice Award (PJA) serta Pelatihan Paralegal Serentak (Parletak). Posbankum yang telah dibentuk diharapkan mampu menjadi sarana penyelesaian sengketa dan permasalahan hukum secara langsung di tingkat desa dan kelurahan.

Dalam kunjungannya, Anton menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa dan lurah atas peran aktif mereka dalam pendirian Posbankum serta keikutsertaan dalam program-program Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

“Saya sangat mengapresiasi, khususnya kepada Lurah dan Kepala Desa yang telah mendirikan Posbankum dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan PJA maupun Parletak. Untuk memastikan layanan berjalan optimal, perlu dipahami bersama bahwa Posbankum hadir untuk memberikan layanan bantuan hukum yang mudah dijangkau masyarakat. Posbankum juga menjadi wadah penyelesaian sengketa, peningkatan kesadaran hukum, serta pendampingan hukum,” jelas Anton.

Sementara itu, Kepala Desa Palimbang Sari, Baddarudin, mengungkapkan bahwa sejak pendirian Posbankum, beberapa permasalahan hukum telah berhasil ditangani di tingkat desa.

“Sejak kami mendirikan Posbankum, telah ada beberapa persoalan yang kami selesaikan, antara lain kasus perceraian, peredaran narkoba, kenakalan remaja, serta berbagai kasus lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban desa,” ungkap Baddarudin.

Untuk meningkatkan kualitas layanan Posbankum, tim dari Kanwil memberikan penguatan kepada kepala desa, lurah, paralegal, dan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) terkait prinsip-prinsip dasar penanganan perkara hukum oleh Posbankum. Kanwil Kementerian Hukum Kalsel juga menegaskan kesiapannya membuka ruang konsultasi dan koordinasi bagi desa dan kelurahan dalam mengelola Posbankum secara berkelanjutan.

## Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Dorong Penguatan Program Pembinaan Hukum di Hulu Sungai Utara



Amuntai, Humas\_Info – Dalam upaya memperkuat pembangunan hukum di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) melaksanakan kegiatan koordinasi dan penguatan program pembinaan hukum bersama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kamis (25/06/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi PPPH, Anton Edward Wadhana, didampingi oleh Penyuluh Hukum Kantor Wilayah, dan diterima oleh Khairussalim Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah HSU, serta Rusni Kepala Bagian Hukum.

Dalam pertemuan tersebut, Anton memaparkan sejumlah program unggulan dan prioritas nasional yang tengah dijalankan oleh Kanwil Kemenkum Kalsel. Beberapa di antaranya yaitu Peacemaker Justice Award (PJA), Pelatihan Paralegal, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, serta rencana pembentukan Peraturan Bupati tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Program-program ini menjadi bagian penting dari pembangunan hukum nasional. Kami mengapresiasi partisipasi HSU dalam PJA 2025 yang mengirimkan tiga kepala desa sebagai peserta, serta pelaksanaan pelatihan paralegal yang telah menghasilkan 20 peserta dan pembentukan 14 Pos Bantuan Hukum di desa binaan,” ungkap Anton.

Ia juga menyoroti pentingnya implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, yang hingga kini belum berjalan optimal. Sementara itu, draft Peraturan Bupati tentang Koperasi Desa Merah Putih telah disusun oleh Pemda HSU dan diharapkan segera masuk tahap harmonisasi di Kantor Wilayah.

Menanggapi hal tersebut, Khairussalim menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkum Kalsel atas pendampingan yang diberikan. “Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dalam peningkatan pembangunan hukum di daerah. Harapannya seluruh program yang telah disampaikan dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel berharap sinergi dan kolaborasi strategis dengan seluruh unsur Pemerintah Kabupaten HSU dapat terus diperkuat demi kelancaran pelaksanaan program prioritas nasional, serta peningkatan kualitas layanan hukum di Kalimantan Selatan.

## Optimalisasi Sistem Digital, Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Sosialisasi SIMWas dan SIPIDU Itjen



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Sosialisasi Akses Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIMWas) Inspektorat Jenderal versi 3.0 dan Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Terintegrasi dan Terpadu (SIPIDU) yang dilaksanakan secara daring oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkum RI, Kamis (26/6/25).

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Itjen Kemenkum RI, Baroto, yang menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Inspektorat Jenderal serta mengoptimalkan penggunaan aplikasi oleh para operator yang tersebar di seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah di lingkungan Kemenkum RI.

Aplikasi SIMWas 3.0 merupakan pengembangan dari sistem sebelumnya yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan pengawasan. Versi terbaru ini menghadirkan tampilan yang lebih user-friendly, fitur pelacakan dokumen secara real-time, serta integrasi data yang lebih kuat antar-unit kerja.

Sementara itu, aplikasi SIPIDU hadir sebagai inovasi dalam sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang lebih terintegrasi dan terpadu. Melalui SIPIDU, proses penanganan pengaduan menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat dimonitor secara sistematis, sehingga memperkuat prinsip akuntabilitas dan responsif terhadap pelayanan publik.

Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, Teknologi Informasi dan Layanan Pengaduan Kanwil Kemenkum Kalsel, Eko Sulistiyono, yang hadir bersama operator SIMWas dan SIPIDU menyambut baik kegiatan ini.

“Kami berharap dengan sosialisasi ini, pemahaman operator terhadap penggunaan aplikasi dapat meningkat, sehingga pelaksanaan pengawasan internal dan penanganan pengaduan di wilayah dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” ungkapnya.

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah konkret dalam mendukung reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengawasan berbasis digital di lingkungan Kementerian Hukum RI.

## Dekatkan Layanan, Kemenkum Kalsel Sosialisasikan Pentingnya Perlindungan Merek bagi 100 IKM Banjarmasin



Banjarmasin, Humas\_Info — Dalam rangka memperkuat kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual berperan aktif dalam kegiatan Sosialisasi Kekayaan Intelektual Bidang Merek yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin. Kegiatan ini diikuti oleh 100 pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai langkah konkret mendorong legalitas usaha berbasis perlindungan hukum kekayaan intelektual.

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, dalam paparannya menjelaskan secara komprehensif mengenai pentingnya mendaftarkan merek sebagai bentuk perlindungan hukum atas identitas produk. Ia juga memaparkan prosedur pendaftaran merek yang benar agar tidak ditolak, serta memberikan tips praktis, mulai dari pemilihan nama merek yang khas dan tidak melanggar hak pihak lain, hingga pemenuhan dokumen administratif yang diperlukan.

“Pendaftaran merek bukan hanya soal legalitas, tetapi juga strategi membangun daya saing. Produk yang bermerek lebih dipercaya pasar dan memiliki perlindungan hukum dari pembajakan,” ungkap Riswandi.

Antusiasme tinggi tampak dari para peserta yang mayoritas berasal dari sektor kreatif dan kuliner. Sosialisasi ini menjadi ruang interaktif untuk menggali pengetahuan, bertanya langsung, dan memahami urgensi perlindungan hukum terhadap merek usaha mereka.

Secara terpisah, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah, menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi yang terjalin dengan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengakselerasi pemahaman masyarakat mengenai kekayaan intelektual.

“Kementerian Hukum hadir untuk mendampingi pelaku usaha dalam melindungi hasil karya dan identitas usahanya. Perlindungan merek merupakan bagian penting dari ekosistem hukum yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kami berharap, kegiatan seperti ini bisa terus berkelanjutan di berbagai daerah,” ujar Meidy.

Dengan digelarnya kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku IKM di Banjarmasin yang terdorong untuk mendaftarkan mereknya secara resmi, sebagai langkah menuju penguatan usaha yang berkelanjutan dan berbasis hukum.

## Kawal 100 Merek IKM, Kemenkum Kalsel Dampingi Langsung Pelaku Usaha di Banjarmasin



Banjarmasin, Humas\_Info — Komitmen untuk menghadirkan layanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat terus ditunjukkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Melalui Tim Layanan Kekayaan Intelektual, Kemenkum Kalsel melaksanakan kegiatan Pendampingan Layanan Permohonan Merek bagi 100 pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Banjarmasin pada Kamis (26/06/2025).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi sebelumnya yang diinisiasi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin. Tujuannya adalah untuk mendorong legalitas usaha, khususnya dalam hal perlindungan merek sebagai aset penting pelaku usaha sektor riil.

Tim dari Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel turun langsung memberikan asistensi, mulai dari pemeriksaan kelayakan merek, penyusunan dokumen, hingga proses penginputan data ke dalam sistem daring milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendampingan dilakukan dengan pendekatan personal serta metode jemput bola, memastikan seluruh proses berjalan efektif dan menyentuh langsung kebutuhan IKM.

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui perlindungan hukum atas merek.

"Dengan target 100 permohonan merek yang kami dampingi secara langsung, kami ingin memastikan pelaku IKM memiliki kekuatan hukum yang mampu melindungi dan mengembangkan reputasi usaha mereka," ujar Riswandi.

Program ini disambut positif oleh para peserta, yang mayoritas berasal dari sektor kreatif dan kuliner. Mereka menilai kegiatan ini sangat membantu dalam memahami prosedur pendaftaran merek serta pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dalam menjaga keberlangsungan usaha.

Dengan adanya program pendampingan ini, diharapkan kesadaran pelaku IKM terhadap pentingnya merek sebagai bagian dari strategi bisnis akan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan upaya membangun ekonomi daerah berbasis kekayaan intelektual yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya saing IKM di pasar nasional maupun internasional.

## Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Harmonisasi Ranperbup Hulu Sungai Tengah Terkait Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kamis (26/06/2025) bertempat di Balai Pertemuan Garuda.

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward, serta dihadiri oleh para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel, Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Hulu Sungai Tengah.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Irfan Sunarko, menyampaikan bahwa penyusunan Ranperbup ini sangat penting mengingat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayahnya menghadapi kendala geografis yang cukup menantang. Untuk itu, diperlukan penggabungan pembentukan koperasi di beberapa wilayah yang sulit dijangkau. Ia berharap Ranperbup ini dapat segera terharmonisasi dan ditetapkan oleh Bupati demi menunjang capaian program pemerintah secara optimal.

Rapat ini juga menjadi forum teknis untuk menyempurnakan isi Ranperbup. Eryck Yulianto memberikan masukan terkait dasar hukum dan penyesuaian redaksional, termasuk menyarankan penghapusan istilah Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dalam Ketentuan Umum sesuai arahan kebijakan terbaru dari Menteri Hukum. Perancang lainnya, IWira Arianty dan M. Rezki Kusuma, turut memberikan koreksi teknis terhadap beberapa rumusan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menutup rapat, Anton Edward menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh pihak yang terlibat dan menegaskan bahwa harmonisasi Ranperbup ini menjadi langkah penting dalam mendukung penguatan kelembagaan koperasi di daerah melalui skema Koperasi Merah Putih.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui regulasi yang tepat dan aplikatif.

## Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Hadiri Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2025



Banjarmasin, Humas\_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menunjukkan komitmennya dalam mendukung upaya pemberantasan narkotika dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (26/06/2025).

Mengusung tema “Memutus Rantai Peredaran Gelap Narkotika melalui Pencegahan, Rehabilitasi dan Pemberantasan menuju Indonesia Emas Tahun 2045”, acara ini digelar secara hybrid dan serentak di seluruh Indonesia, dengan pusat kegiatan nasional di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, Anton Edward Wardhana, hadir mewakili Plt Kepala Kantor Wilayah. Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal sinergi lintas sektor dalam memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkotika melalui pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga, khususnya dalam konteks pemberian layanan hukum dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Narkotika Nasional RI menegaskan bahwa peringatan HANI menjadi momen penting untuk membangkitkan empati masyarakat terhadap keluarga korban penyalahgunaan narkotika, dan menjadi refleksi atas peran negara dalam mengurai permasalahan narkotika yang hingga kini telah menjangkiti sekitar 3,3 juta masyarakat Indonesia.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan antar unsur Forkopimda dalam memutus rantai peredaran gelap narkotika serta melindungi generasi muda dari ancaman serius tersebut.

Acara turut diisi dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah instansi pemerintah, lembaga, serta tokoh masyarakat atas dedikasinya dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), serta ditutup dengan penampilan drama teatrikal dan penyalaan lilin sebagai simbol perjuangan melawan narkotika.

Dengan kehadiran aktif dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan Indonesia yang bersih dari narkotika menuju visi Indonesia Emas 2045.



**KEMENTERIAN HUKUM  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**

**#** bangga  
melayani  
bangsa



Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkalsel](#)



[@kemenkumkalsel](#)



[kalsel.kemenkum.go.id](#)